



Research Article

Peran Pendidikan Islam Terhadap Sosial Politik Indonesia Di Era Digital

Hamdi Hidayat¹, Muhtadi Abdul Mun'im²

1. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan; hidayathamdi26@gmail.com
2. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan; muhatadi@idia.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 10, 2024

Revised : August 25, 2024

Accepted : September 03, 2024

Available online : December 17, 2024

How to Cite: Hamdi Hidayat, & Muhtadi Abdul Mun'im. (2024). The Role of Islamic Education In Indonesia's Socio-Politics in The Digital Era. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 125-131. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v1i2.24>

The Role of Islamic Education In Indonesia's Socio-Politics in The Digital Era

Abstract. This research discusses the role of Islamic education in the context of Indonesia's social and political landscape in the digital era, characterized by advancements in information and communication technology. The introduction explains that the digital era has transformed the way social interactions occur and information is disseminated, bringing challenges and opportunities for society, especially the youth. The research methodology employed is a qualitative approach using library research, which includes a literature analysis related to the theme of Islamic education and its impact on social and political morals and ethics. The findings indicate that Islamic education serves as a tool for building the character and morals of students while also providing critical political and social awareness.

Keywords: Islamic Education, Social Politics, Digital Era

Abstrak. Penelitian ini membahas peran pendidikan Islam dalam konteks sosial politik Indonesia di era digital, yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pendahuluan,

dijelaskan bahwa era digital telah mengubah cara interaksi sosial dan penyebaran informasi, membawa tantangan dan peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pustaka, yang meliputi analisis literatur terkait tema pendidikan Islam dan dampaknya terhadap moral dan etika sosial politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk membangun karakter dan moral peserta didik, sekaligus memberikan kesadaran politik dan sosial yang kritis.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Sosial Politik, Era Digital

PENDAHULUAN

Dunia kini berada dalam sebuah era kemajuan yang ditandai oleh teknologi dan perangkat komunikasi serta informasi berbasis digital, yang sering disebut sebagai era digital. Era ini menggambarkan keadaan di mana penggunaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis internet semakin meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, seni, olahraga, pemerintahan, pendidikan, dan interaksi sosial. Pengaruh era digital telah merambah ke seluruh penjuru dunia, menghubungkan negara-negara tanpa batas, sehingga informasi dari satu wilayah dapat diakses secara instan oleh orang-orang di wilayah lain. Fenomena ini muncul sebagai hasil dari perkembangan pesat globalisasi, yang telah menggantikan dominasi era konvensional (Nuryadin, 2017).

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi dan perangkat digital semakin maju dan terus diperbarui. Gelombang peradaban ini membuat manusia tidak dapat terlepas dari produk-produk digital, menciptakan keterhubungan yang semakin erat dan saling bergantung di antara individu dan masyarakat. Meskipun secara geografis masih terdapat batasan wilayah dan garis pemisah, batasan ini tidak lagi menjadi penghalang untuk interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara terbuka di kalangan masyarakat digital. Namun, perubahan zaman yang terjadi di era ini tidak hanya membawa potensi kemajuan, tetapi juga dapat mengarah pada masalah moral jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama (Nuryadin, 2017).

Adapun contoh kasus sosial politik seperti korupsi politik di Indonesia, seperti kasus di Kota Malang di mana 41 dari 45 anggota DPRD menjadi tersangka korupsi, mencerminkan krisis moral dan etika yang serius di negara ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merajalela, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional, seperti yang terjadi pada sejumlah anggota DPR RI. Korupsi birokrasi yang melibatkan kepala daerah tingkat I dan II yang berstatus tersangka atau terdakwa di KPK semakin memperkuat gambaran degradasi moral yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, adanya praktik sistem "ngijon" yang mengarah pada penyimpangan etika menunjukkan bagaimana perilaku korupsi menjadi norma di kalangan elit partai politik dan birokrasi, berkontribusi terhadap kemerosotan nilai moral dalam masyarakat (Habibi, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa masalah moral dalam politik di Indonesia bukan hanya sebagai isu individual, tetapi juga sebagai fenomena sistemik yang membutuhkan perhatian serius dan upaya reformasi untuk memulihkan integritas dan etika dalam pemerintahan.

Uraian diatas menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai agama sangat diperlukan untuk peserta didik, khususnya di era digital, agar mereka tidak terjebak dalam arus degradasi dan krisis moral. Degradasi dan krisis moral ini menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan, dan pendidikan agama dapat menjadi alternatif untuk mencegah dampak negatif dari transformasi sosial di era digital. Dengan mengintegrasikan pendidikan Islam, diharapkan peserta didik dapat diarahkan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Mufidah Hayati et al., 2023).

Peneliti mengangkat pembahasan di atas karena menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di tengah kemajuan teknologi yang pesat dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam era digital, di mana informasi dapat diakses secara cepat dan luas, krisis moral dan etika menjadi tantangan besar, terutama di kalangan generasi muda. Bersamaan dengan meningkatnya kasus korupsi dan penyimpangan etika dalam politik, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan moral dan etika kepada peserta didik, agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat merusak tatanan sosial. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama, diharapkan generasi muda dapat berkontribusi positif dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia, serta menjaga integritas dan etika dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini berfokus pada analisis teks dan informasi yang berkaitan dengan tema kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku akademis, artikel jurnal, hasil penelitian ilmiah, dokumen seminar, dan berbagai referensi lainnya. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan identifikasi wacana dari literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, jurnal, dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Proses ini bertujuan untuk menemukan variabel, catatan, dan transkrip yang mendukung kajian yang sedang dilakukan.

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode analisis yang digunakan adalah hermeneutika, yang merupakan cara untuk memahami dan menginterpretasikan objek dengan makna tertentu untuk menghasilkan penilaian yang objektif. Dalam tahap ini, pernyataan para ahli akan dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait isu yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Sosial Politik di Era Digital

Kontestasi politik dalam era digital telah mengalami perubahan signifikan, terutama terkait dengan perilaku politik masyarakat. Di tengah gelombang disrupsi

yang terus melanda, strategi politik partai-partai menjadi semakin penting karena masyarakat kini beralih dari pola perilaku tradisional menuju perilaku yang lebih digital. Transformasi ini membawa peluang bagi partai politik baru untuk menjangkau massa melalui kampanye yang lebih efektif dan murah, menggunakan platform digital dan media sosial. Masyarakat kini memiliki akses lebih mudah ke informasi politik, yang mempercepat proses demokratisasi pengetahuan dan memungkinkan lebih banyak individu terlibat dalam proses politik, yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau (Mufidah Hayati et al., 2023).

Namun, tantangan yang muncul seiring dengan peluang ini juga tidak bisa diabaikan, terutama dalam hal penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Di era di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, hoaks menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat. Contohnya, hoaks yang muncul menjelang pemilu sering kali memanfaatkan ketakutan dan harapan masyarakat untuk membentuk opini publik, yang bisa merusak integritas pemilihan dan demokrasi itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memberikan akses informasi yang luas, ketidakpastian dan disinformasi juga meningkat, menciptakan tantangan baru bagi partai politik dan masyarakat (Barokah & Hertanto, 2022).

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Upaya edukasi mengenai cara memverifikasi fakta dan mengenali sumber berita yang dapat dipercaya menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dari hoaks. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyebar hoaks juga perlu dilakukan agar tidak ada yang merasa kebal dan bebas untuk menyebarkan informasi yang merugikan (Barokah & Hertanto, 2022). Maka dari itu, meskipun era digital memberikan peluang baru untuk keterlibatan politik yang lebih luas, tantangan yang ada, terutama terkait informasi yang tidak benar, harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan kesehatan demokrasi dan moral masyarakat tetap terjaga.

Konsep Pendidikan Islam dalam Sosial Politik

Pendidikan Islam dalam sosial politik dapat dipahami sebagai suatu upaya sistematis untuk mengubah perilaku peserta didik agar menjadi individu yang lebih baik, tidak hanya dalam aspek pribadi tetapi juga sosial dan lingkungan. Menurut M. Arifin, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran politik dan sosial di kalangan umat. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan menjadi sangat relevan untuk dipahami, karena ketiganya saling memengaruhi dalam pembentukan masyarakat yang berkeadaban (Tusadia & Khoiri, 2023).

Politik dapat didefinisikan sebagai studi tentang memperoleh kekuasaan, yang meliputi pengetahuan tentang administrasi negara serta berbagai kebijakan strategis. Dalam hal ini, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan otoritas formal, tetapi juga mencakup kekuatan-kekuatan lain yang beroperasi dalam masyarakat, seperti ekonomi dan militer. Dalam konteks pendidikan Islam, otoritas politik berfungsi

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan pengembangan nilai-nilai Islam (Tusadia & Khoiri, 2023). Oleh karena itu, lembaga pendidikan dianggap penting oleh penguasa untuk mempertahankan dan memperkuat posisi otoritas mereka, mengingat pendidikan merupakan sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan doktrin Islam.

Kedekatan antara pendidikan Islam dan kekuasaan tampak jelas dalam sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam awalnya berlangsung di masjid, di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya memberikan ajaran kepada para pengikutnya. Seiring waktu, pusat-pusat pendidikan Islam semakin berkembang, seperti di Makkah, Madinah, dan Baghdad. Institusi-institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan dan pengaruh. Sistem pendidikan Islam modern di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bagaimana pendidikan menjadi bagian integral dari kekuasaan politik. Pendidikan di lembaga-lembaga seperti UIN dan IAIN memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan politik di negara tersebut (Mujib & Yunita, 2018).

Interaksi antara politik, kekuasaan, dan pendidikan sangat bergantung pada konteks sosial politik yang ada. Dalam banyak kasus, pendidikan digunakan sebagai alat untuk mendukung kekuasaan politik dan menegakkan ideologi tertentu. Dalam hal ini, proses domestikasi dalam pendidikan menggambarkan bagaimana sistem pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kebijakan dan kekuasaan yang ada, menciptakan lingkungan yang menghambat kreativitas dan pembentukan karakter yang mandiri. Pendidikan yang bersifat indoktrinatif dapat mengarahkan peserta didik untuk menerima ajaran tanpa kritik, yang pada akhirnya dapat memunculkan kondisi pembodohan (Tusadia & Khoiri, 2023).

Meskipun demikian, terdapat harapan bagi pendidikan Islam untuk berkontribusi pada pengembangan demokrasi pendidikan yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan kebebasan pilihan dalam pendidikan, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Upaya ini juga harus didukung oleh kebijakan yang adil dan berimbang dalam alokasi anggaran pendidikan, sehingga pendidikan Islam tidak terpinggirkan dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Pendidikan yang berkualitas, ditopang oleh integrasi sosial yang positif, dapat menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab, sekaligus memperkuat posisi pendidikan Islam dalam kerangka sosial politik yang lebih luas (Baharuddin & Hizam, 2022).

Peran Pendidikan Islam terhadap Sosial Politik di Era Digital

Pendidikan Islam dalam konteks sosial politik di era digital menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Sejak kedatangan ajaran Islam di Indonesia, pendidikan Islam telah berkembang melalui berbagai lembaga, mulai dari surau hingga pesantren, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan karakter santri. Pesantren, yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua, telah berperan dalam mencetak kader ulama dan tokoh masyarakat. Namun, dalam era digital ini, pendidikan Islam dihadapkan pada perubahan mendasar dalam cara informasi disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat (Jamil et al., 2023).

Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang penting dalam penyebaran pendidikan Islam. Banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya mulai memanfaatkan platform digital untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran. Hal ini memungkinkan santri dan masyarakat umum untuk belajar tentang ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan etika dalam konteks yang lebih modern dan relevan. Melalui media sosial, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran daring, pendidikan Islam dapat menjangkau audiens yang lebih besar, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Nuryadin, 2017).

Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Informasi yang beredar di dunia maya tidak selalu akurat atau sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya (Mufidah Hayati et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyaring informasi yang diterima oleh santri dan masyarakat agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah. Di sinilah peran pendidik dan ulama menjadi sangat penting dalam membimbing dan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam serta menjelaskan konteks sosial politik yang ada.

Dalam aspek sosial politik, pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk karakter dan pemikiran politik santri. Keragaman ideologi yang muncul dari berbagai lembaga pendidikan Islam seperti modernis, fundamentalis, konservatif, dan nasionalis menciptakan dinamika dalam cara santri berpikir dan berinteraksi dengan isu-isu politik (Mu'ti, 2016). Di era digital, diskusi dan debat mengenai isu-isu sosial dan politik dapat dilakukan dengan lebih terbuka, memungkinkan santri untuk terlibat aktif dalam perdebatan yang membentuk pandangan mereka terhadap masyarakat dan negara.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa pendidikan Islam di era digital bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang membentuk kesadaran kritis santri terhadap lingkungan sosial politiknya. Lembaga pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam yang mengedepankan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih sadar, terdidik, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di era digital, di tengah tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks sosial politik Indonesia, di mana masalah seperti korupsi dan degradasi moral semakin marak, pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan bimbingan yang relevan untuk mendorong generasi muda agar terlibat secara positif dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan memanfaatkan platform digital untuk penyebaran nilai-nilai agama dan etika, serta mempromosikan pemikiran kritis, pendidikan Islam berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan sadar akan tanggung jawab

sosialnya. Oleh karena itu, integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting untuk mengatasi isu-isu moral dan etika yang dihadapi masyarakat di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, & Hizam, I. (2022). Peran Kekuasaan dalam Pendidikan. *Society*, 13(1).
- Barokah, F., & Hertanto. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1).
- Habibi. (2018). Krisis Moral dan Etika Bangsa Indonesia Masih Sulit Dikendalikan [Pendidikan]. *UMY: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
<https://www.umi.ac.id/krisis-moral-dan-etika-bangsa-indonesia-masih-sulit-dikendalikan>
- Jamil, N. A., Masyhuri, M., & Nur Ifadah. (2023). Perspektif Sejarah Sosial dan Nilai Edukatif Pesantren dalam Pendidikan Islam. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 3(2).
- Mufidah Hayati, Firani Putri, Muhammad Hafizh, & Januar Januar. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Perspektif Sosial dan Tantangan Kontemporer. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 224–235. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.797>
- Mujib, A., & Yunita, Y. (2018). Pendidikan Islam dan Politik. *Jurnal Ri'ayah*, 3(1).
- Mu'ti, A. (2016). Akar pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(1).
- Nuryadin, N. (2017). STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1), 209–226.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.637>
- Tusadia, A., & Khoiri, Q. (2023). Relasi Pendidikan Islam, Politik dan Kekuasaan. *Journal on Education*, 5(2).